BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

Kerangka Teori

Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie* yang berasal dari bahasa latin *immigratio*. Kata kerjanya ialah *immigreren* dalam bahasa latin *immigrare*. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata, yaitu in yang artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri. Dalam *Encyclopedia of the Social Science*, disebutkan bahwa : *immigration is the entrance into an alien country of persons intending to take part in the life of that country and to make it their more or less permanent residence*. Sedangkan dalam *Black'S Law Dictionary*, disebutkan bahwa: *immigration is the coming into a country of foreigners for purposes of permanent residence* (Sihombing, 2013).

Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian diundangkan, ketentuan - ketentuan perundang-undangan di bidang keimigrasian tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda, yaitu Toelatingsbesluit 1916, Toelatingsbesluit 1949, dan Toelatingsordonantie 1949, begitupula peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, seperti Undang- Undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang bea imigrasi, Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang pengawasan orang asing, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini. Baik karena perkembangan nasional maupun internasional telah berkembang hukum-hukum baru yang mengatur mengenai wilayah Negara dan berbagai hak berdaulat yang diakui oleh hukum dan pergaulan internasional yang mempengaruhi ruang lingkup tugas dan wewenang keimigrasian (Hamidi & Christian, 2015).

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian adalah pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Undang-Undang Keimigrasian yang sampai saat ini dipakai adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang ini yang diartikan sebagai keimigrasian adalah segala hal ihwal mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan wilayah Negara Republik Indonesia itu sendiri adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau wilayah Indonesia, sedangkan orang asing atau mereka yang berstatus bukan warga Negara Indonesia, untuk berpergian masuk dan keluar wilayah Indonesia diharuskan mendapatkan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat keimigrasian pada kantor perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia (Hamidi & Christian, 2015).

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan seperti dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, olahraga yang tidak bersifat komersial, studi banding, kursus/pelatihan singkat, memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia, melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang, pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang, melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pembelian barang, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia, calon tenaga kerja asing dalam uji coba

kemampuan dalam bekerja, meneruskan perjalanan ke negara lain; dan bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia (Sihombing, 2013).

Orang asing dapat memperoleh visa kunjungan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia, jika negaranya termasuk dalam daftar negara Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Visa kunjungan saat kedatangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari, atau Orang asing dapat mengajukan visa kunjungan melalui perwakilan Indonesia di Luar Negeri atau melalui penjamin di Indonesia dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Visa Kunjungan diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI di Luar Negeri Perhatian: Silahkan lihat di tata cara Visa kunjungan diberikan lama tinggal 60 (enam puluh) hari, dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali dan setiap kali perpanjangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari. Orang asing dapat berkunjung beberapa kali ke wilayah Indonesia hanya untuk tujuan kunjungan keluarga, bisnis dan tugas pemerintahan (Sihombing, 2013).

Secara operasional peran Keimigrasian dapat diartikan dalam konsep 4 (empat) fungsi Keimigrasian. Fungsi Pelayanan Keimigrasian Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari:

1. Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan PLB

2. Pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar Pelayanan bagi Warga Negara Asing terdiri dari:

- a) Pemberian Dokumen Keimigrasian (Dokim) berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) bagi Awak alat angkut.
- b) Perpanjangan Izin Tinggal berupa: Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
- c) Perpanjangan Dokim meliputi Perpanjangan KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
- d) Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak, Tanda Masuk dan Tanda Keluar.

Fungsi Penegakan Hukum Dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian, keseluruhan aturan Hukum Keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah negara hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia ditujukan pada permasalahan:

1. Pemalsuan Identitas
 2. Pertanggungjawaban Sponsor
 3. Kepemilikan Paspor Ganda
 4. Keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan Keimigrasian
- Penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan:

- a) Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA)
- b) Pendaftaran Orang Asing (POA) dan Pemberian Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA)
- c) Penyalahgunaan Izin Tinggal
- d) Masuk secara tidak sah (Illegal Entry) atau Tinggal secara tidak sah (Illegal Stay).
- e) Pemantauan atau Razia
- f) Kerawanan Keimigrasian secara Geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat Pro Justitia yaitu kewenangan penyidikan tercakup tugas penyidikan dalam mencakup pelanggaran keimigrasian pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, pemberkasaan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum yang nantinya dalam proses pelaksanaan tersebut imigrasi melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan (Hamidi & Christian, 2015).

Institusi Keimigrasian Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Negara

Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan Kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan.

Dalam pelaksanaan penangkalan bagi warga negara Indonesia dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan Internasional yang menyatakan seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah:

- Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan Visa,
- Melakukan kerjasama dengan aparat keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan Hukum Keimigrasian,
- Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian bagi kepentingan Negara,
- Melakukan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu

dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi system perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundangan-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan Negara Republik Indonesia dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian.

Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain memberika kemudahan izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diharapkan akan tercipta investasi yang menyenangkan dan dalam hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era sekarang ini aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat Internasional, terutama di bidang perekonomian demi kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas

hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan.

Dalam perkembangan 4 (empat) fungsi imigrasi merupakan pergeseran dari perubahan Trifungsi Imigrasi sebelumnya yang dituntut adanya perubahan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yaitu:

”Trifungsi Imigrasi yang merupakan ideology atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan Keimigrasian harus diubah karena perubahan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (territory) yang hanya meliputi keamanan nasional (national security) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (human security) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut, saya hanya memberi pesan agar insane Imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (inward looking) menjadi cara pandang ke luar (outward looking) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma Trifungsi Imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat,

penegak hukum, dan sekuriti agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi”.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang isinya terdiri dari pengaturan yang bersifat hukum administratif dan sanksi yang menjelaskan mengenai ketentuan Pidana Keimigrasian. Hal yang bersifat hukum administratif adalah hal yang memuat tentang pengaturan, pelayanan, perijinan dari aspek-aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, Surat Perjalanan Republik Indonesia, sedangkan hal yang mengenai proses penegakan hukum, dan sanksi pidana adalah tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Penyidikan dan Ketentuan Pidana. Dari hal-hal yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan dasar hukum keimigrasian Indonesia diuraikan sebagai berikut: Hal ini tercatat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antara bangsa dan negara, diperlukan penyempurnaan peraturan-peraturan keimigrasian yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu materi muatan terbentuknya peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-Undang nomor 6 Tahun 2011

tentang keimigrasian masih ditemukan beberapa pasal yang belum dapat memberikan kepastian secara hukum. Untuk mewujudkan peradilan yang bersih memang harus dimulai dari kalangan hakim, sebagai sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dan selanjutnya penegak hukum lainnya harus memiliki sikap mental, moral yang baik, kemampuan substansial secara profesional serta komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum sesuai dengan tuntutan masyarakat an tuntutan Era Reformasi, dan selain itu perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus terhadap aparat penegak hukum baik secara institusional maupun oleh masyarakat. Pengaturan untuk menghindari terjadinya perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal oleh orang asing yang berada di Indonesia kebijakan hukumnya harus diarahkan sebagai berikut: 1. Perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal berada dalam domain pelanggaran hukum administratif, sehingga proses penegakan hukumnya berada di luar sistem peradilan pidana, dengan bentuk keputusan pejabat imigrasi. 2. Kriteria dan pertimbangan pengenaan jenis-jenis tindakan keimigrasian diatur secara ketat demi menjaga terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum dan persamaan di muka hukum. Namun demikian sebagai bentuk keputusan administratif, tetap ada diskresi pejabat imigrasi untuk menilai secara langsung duduk perkara dan alasan-alasan lain yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal kasus per kasus. 3. Mekanisme keberatan atas keputusan administratif disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara (tata usaha negara). 4. Perluasan jenis tindakan keimigrasian dengan mencantumkan pengenaan denda (biaya beban) pada perumusan saksi atas

perbuatan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Denda yang selama ini merupakan bentuk pidana ditarik menjadi salah satu bentuk tindakan keimigrasian. Denda tersebut setelah setuju dibayarkan menjadi Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Rekening kas Negara. 5. Upaya preventif terhadap pelanggaran melampaui batas waktu dilakukan oleh sistem informasi keimigrasian yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan visa dan izin tinggal, serta sistem peringatan ketika orang asing tersebut berada di Indonesia.¹⁰ Tindakan Keimigrasian atau Tindakan Administratif di luar Sistem Peradilan Pidana, dan aspek penegakan hukum secara pro yustitia (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya termasuk dalam keluarga Hukum Administrasi, oleh karenanya Penalisasi dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat dibenarkan (Administrative Penal Law), secara umumbiasanya sanksi penal dalam Hukum Administratif adalah ringan, namun dalam kenyataannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian karena memuat ancaman sanksi pidana penjara dan sebagian besar digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dianggap berat.

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Asing di Indonesia

Sebagian besar Negara mempunyai hak penuh untuk menolak masuknya warga asing ke dalam kawasan teritorialnya, kecuali beberapa orang yang telah memenuhi syarat-syarat prosedural yang ditentukan. Negara tidak harus tunduk kepada Hukum Internasional untuk mengizinkan masuknya orang-orang asing, dan

bukan suatu kewajiban bagi negara untuk tidak mengusir mereka. Masalah izin masuk warga asing biasanya terdapat pada traktat atau perjanjian yang mengatur di antara dua atau lebih dari dua negara, terutama negara yang mempunyai batas teritorial darat. Seperti nota kesepahaman Indonesia-Malaysia yang mengatur migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia melalui perjanjian bersama (Hamidi & Christian, 2015).

Selain memberikan izin masuk kepada warga asing, Negara juga mempunyai hak untuk menjauhkan dan mengusir warga asing dari kawasan teritorial (rekonsidusi). Prinsip ini memuat hak-hak, dan hak negara untuk memberikan atau tidak memberikan izin masuk. Namun rekonduksi dimaksudkan untuk menjauhkan individu tertentu yang sebagian besar disebabkan pertimbangan stabilitas keamanan dan ketertiban. Hak merekonduksi ini adalah hak Negara, seperti halnya hak mengasingkan individu tertentu dari warga negaranya karena alasan tertentu. Salah satu masalah perlindungan warga asing menyangkut kedudukannya di dalam teritorial negara adalah tentang yuridiksi. Yuridiksi adalah berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum di dalam kawasan tertentu. Perbedaan konteks yuridiksi sering menjadi bahan perdebatan. Terdapat yuridiksi teritorial, di mana hukum berlaku kepada setiap individu yang tinggal di dalam kawasan tersebut, terlepas dari apakah individu tersebut warga negara asli ataupun warga negara asing. Selain itu juga terdapat yuridiksi terhadap individu, di mana individu ini bertempat tinggal di kawasan teritorial negara lain. Yuridiksi teritorial mencakup jalur pantai maritim Negara, kapal-kapal dan pesawat udara milik negara tersebut, pelabuhan-pelabuhan (Hamidi & Christian, 2015).

Berdasarkan Pasal 28a UUD 1945 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pelaksanaan hak warga negara dalam UUD 1945 dikaitkan langsung dengan kewajiban karena memang mempunyai keterkaitan khusus perumusan hak dan kewajiban itu di cantumkan dalam Pasal 27 ayat 1 masalah hak-hak warga negara misalnya pendidikan, kesejahteraan sosial dan pertahanan. Sebelum amandemen tidak ada hak asasi manusia disebabkan karena hak asasi manusia tidak sesuai dengan paham negara integralistik yang dianut UUD 1945.

Tindakan hukum dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* (politik keimigrasian saringan atau selektif) dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 hal pokok, yaitu (Sihombing, 2013):

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia; dan
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas pengawasan orang asing di Indonesia, maka kepada setiap orang asing yang berada di Indonesia harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap WNA yang berada di Indonesia diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut (Hamidi & Christian, 2015):

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil, dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya.
2. Memperlihatkan dokumen perjalanan dan keimigrasian yang dimiliki pada

waktu diperlukan dalam rangka pemeriksaan.

3. Mendaftarkan diri, jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari.

Bentuk pengawasan WNA dapat diawasi dengan 2 cara yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan (Sihombing, 2013):

1. Pengawasan administrative adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat dan dokumen berupa pencacatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian dan penyebaran informasi secara manual dan elektronik, dan kegiatan orang asing.
2. Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan tanda pengenal keimigrasian. Pengawasan lapangan dapat dilakukan ditempat dimana berada orang asing berupa alat angkut, kantor perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian, dan tempat hiburan serta yang lainnya.

Pengawasan keimigrasian bagi WNI yang dilakukan pada saat permohonan dokumen perjalanan keluar atau masuk atau berada diluar wilayah Indonesia dengan cara (Sihombing, 2013):

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
2. Penyusunan daftar nama WNI yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia.
3. Pemantauan terhadap WNI yang memohon dokumen perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia yang berada diluar wilayah Indonesia.
4. Pengambilan foto dan sidik jari.

Hasil pengawasan keimigrasian ini adalah merupakan data keimigrasian yang dikategorikan data bersifat rahasia.

Kerangka Yuridis

Fungsi Keimigrasian Secara Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tanggal 31 Maret 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 di dalam Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Rumusan keimigrasian ini berbeda dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tanggal 5 Mei 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216 di dalam Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara (Sihombing, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak ditemukan rumusan tentang hukum imigrasi atau hukum keimigrasian. Namun, yang ada hanyalah keimigrasian saja sebagaimana diuraikan di atas. Demikian juga sama halnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Sihombing, 2013). Berdasarkan prinsip kedaulatan ini memungkinkan pemerintah untuk membuat regulasi terkait

dengan lalu lintas orang asing yang masuk dari dan ke wilayahnya juga mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Orang asing di Indonesia wajib untuk menghormati hukum positif yang berlaku. Berdasarkan prinsip kedaulatan negara memiliki hak lain berupa kekuasaan, yaitu (Hamidi & Christian, 2015):

1. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik;
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain;
4. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Di dalam angka 2 di atas, tampak jelas bahwa fungsi keimigrasian dalam menerima dan mengusir warga negara dari suatu negara adalah bentuk perwujudan dari kedaulatan yang merupakan salah satu prinsip penting di dalam hukum internasional bahkan termasuk dalam salah satu prinsip atau doktrin *Jus Cogens* (Hamidi & Christian, 2015).

Menurut Iman Santoso, bahwa institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal (Hamidi & Christian, 2015).

Pada hakikatnya pengertian keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah

negara RI, maka secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan (Hamidi & Christian, 2015).

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat (*Public Service*)

Dari aspek ini imigrasi dituntut member pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksana paspor (SPLP), pas lintas batas (PLB), dan pemberian tanda bertolak atau masuk. (Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015: 113) Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, dan pemberian tanda bertolak dan masuk.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berda di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan pada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing, dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan yang bersifat administrative. Sementara itu dalam hal penegakan hukum bersifat proyustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum (Santoso, 2014).

3. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabatkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut.

- a) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- b) Melakukan kerja sama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan *supervise* perihal penegakan hukum keimigrasian.
- c) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- d) Melakukan pencegahan dan penangkalan.

Dalam perkembangan trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan, karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti sama dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya (Hamidi & Christian, 2015).

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., selaku Menteri Kehakiman dan HAM dalam sambutannya pada Hari Bakti Imigrasi tanggal 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perubahan trifungsi imigrasi dengan menyatakan, Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena perubahan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum.

Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang ke luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan

keamanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi (Hamidi & Christian, 2015).

Visa Republik Indonesia

Visa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Secara normative pemberian visa bagi warga negara asing oleh pemerintah Indonesia adalah sebuah manifestasi dari kedaulatan negara yang dituangkan dalam *selective policy* (kebijakan saringan) terhadap orang asing yang dirasakan berguna dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap negara di dunia memiliki aturan tersendiri mengenai kebijakan pemberian visa yang tidak beragam. Sebagai contoh Indonesia, dalam memberikan bebas visa kepada beberapa negara berdasarkan prinsip *reciprocal* (timbang balik). Bebas visa yang diberikan pemerintah RI kepada suatu negara juga harus berlaku sebaliknya yang artinya warga negara dari kedua negara dapat masuk dan keluar wilayah negara masing-masing tanpa harus memiliki visa terlebih dahulu. Dengan demikian, ada suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara. Selain kebijakan bebas visa, pemerintah RI juga dapat memberikan kebijakan *visa on arrival* (visa saat kedatangan yang artinya pemberian visa yang biasanya

diberikan di perwakilan RI dapat diberikan di bandara internasional di Indonesia ketika yang bersangkutan datang di Indonesia, selain pada asas *reciprocal*, juga asas manfaat, di mana pemberian tersebut dapat memberikan manfaat kepada bangsa dan negara dilihat dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Kebijakan bebas visa ini dapat meningkatkan hubungan baik di antara kedua negara. (Hamidi & Christian, 2015)

Dasar hukum mengenai ketentuan visa diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Visa terdiri atas:

- 1) Visa diplomatik,
- 2) Visa dinas,
- 3) Visa Kunjungan, dan
- 4) Visa tinggal terbatas.

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Pemberian visa diplomatik dan visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia (Hamidi & Christian, 2015).

Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Dalam pelaksanaannya secara lebih rinci visa kunjungan dapat diberikan untuk melakukan kegiatan seperti (Sihombing, 2013):

- a. Wisata;
- b. Keluarga;
- c. Sosial;
- d. Seni dan budaya;
- e. Pemerintahan;
- f. Olah raga yang tidak bersifat komersil;
- g. Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
- h. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
- i. Melakukan pekerjaan darurat dan mendadak;
- j. Pembuatan film yang tidak komersil dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- k. Melakukan membicaraan bisnis;
- l. Melakukan pembelian barang;
- m. Jurnalistik yang telah mendapat izin dari industry yang berwenang;
- n. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;

- o. Mengikuti pameran internasional;
- p. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- q. Melakukan audit kendali mutu produk, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
- r. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan bekerja;
- s. Meneruskan perjalanan ke negara lain (transit/singgah); dan
- t. Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing:

- a. Rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam rangka waktu yang terbatas; atau
- b. Dalam rangka bergabung untuk berkerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Visa tinggal terbatas ini diberikan kepada orang asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam waktu terbatas dan dapat juga diberikan kepada orang asing eks WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan undang-undang kewarganegaraan RI dan bermaksud kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Sihombing, 2013).

Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa antara lain;

- a. Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbale balik dan asas manfaat;
- b. Warga negara asing pemegang izin tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku;
- c. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
- d. Nahkoda, awak kapal laut, atau tenaga asing di atas kapal laut atau apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pada tahun 1993 dan 1994, pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dengan memberikan bebas visa kunjungan singkat dengan KepmenKeh No. M.02-IZ.901.02 Tahun 1993 dan M.04-IZ.01.02 Tahun 1994 kepada warga negara AS, Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brazilia, Brunei Darussalam, Chili, Denmark, Filipina, Hongaria, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Canada, Korea Selatan, Kuwait, Lichtensen, Luxembourg, Malaysia, Maldives, Malta, Maroko, Mesir, Mexico, Arabia, Selandia Baru, dan lain-lain sesuai dengan keputusan tersebut. (Sihombing, 2013: 46)Sejalan dengan itu, diberlakukan bebas visa singkat bila masuk melalui pelabuhan udara Polonia (Medan), Simpang Tiga (Pekanbaru), Hang Nadim (Batam), Tabing (Padang), Soekarno Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), Ngurah Rai (Bali), Eltari (Kupang), Supadio (Pontianak),

Sepingan (Balik Papan), Sam Ratulangi (Manado), Patimura (Ambon), Frans Kasiepo (Biak), dan Hasanuddin (Ujung Pandang), bagi negara-negara yang telah ditentukan di atas (Sihombing, 2013).

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yang mulai berlaku tanggal 17 Desember 2003 berlaku untuk negara-negara seperti Thailand, Hongkong SAR, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Hongkong Special Administration Region, Macau SAR, Chili, Maroko, Peru, dan Vietnam. (Sihombing, 2013: 47) Kebijakan pemerintah khusus pemberian bebas visa ini dilakukan untuk tujuan tertentu untuk mendorong pariwisata atau kondisi usaha tertentu. Lamanya bebas visa kunjungan singkat ini diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan statusnya tidak bisa diubah ke izin keimigrasian yang lainnya (Sihombing, 2013).

Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut (Prasetyo, 2013):

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsure yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di man pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjukkan kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai tejemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi (Prasetyo, 2013).

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Nadapdap, 2016).

Unsur – Unsur Tindak Pidana Keimigrasian. Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu (Nadapdap, 2016):

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus di lakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifar melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroaan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Tindak Pidana Imigrasi. Tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 64, yang jika dirinci lebih detail dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60, dan 61;
2. Tindak Pidana Kejahatan (*Misdrijf*), diatur dalam Pasal 48-50, dan Pasal 52 sampai Pasal 59.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ketentuan pidana hanya diatur dalam 15 pasal , tetapi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 karena dengan semakin luasnya cakupan undang-undang ini akhirnya semakin banyak pula jenis tindak pidana yang diatur hingga menjadi 23 pasal. Dalam proses penyidikan tindak pidana Keimigrasian ini dilakukan tetap berdasarkan hukum acara pidana. Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Ginting, Rani, & Ali, 2014).

Ketentuan Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 (23 pasal) yang dikelompokkan pada:

- a. Tindak Pidana Pelanggaran diatur di dalam Pasal 116, 117, 120b, 133e; dan
- b. Tindak Pidana Kejahatan (*Misdrijf*), dalam Pasal 113-136 dikurangi pasal point a di atas.

Penambahan pasal-pasal Tindak Pidana Keimigrasian ini sejalan dengan perluasan ruang lingkup Keimigrasian sebagaimana diuraikan di atas dan sebagai konsekuensi dari semakin luas serta komprehensifnya pengaturan Tindak Pidana Keimigrasian yang baru. Dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu (Sihombing, 2013):

1. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif; dan
2. Tindakan keimigrasian dalam bentuk Tindak Pidana Keimigrasian secara legislasi/litigasi atau proses pengadilan.

Tindakan Administrasi Keimigrasian. Tindakan Administrasi Keimigrasian adalah sanksi administrasi yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses pengadilan. Tindakan Keimigrasian dalam bentuk administrasi lebih dikenal dengan Tindakan Administrasi Keimigrasian. Tindakan ini bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan (Sihombing, 2013).